

**ANALISIS PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA
ELEKTRONIK PADA PEMDA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

VEBY MAYA REVANI
2015/15133087

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2019

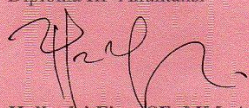
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA
ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN

Nama : Veby Maya Revani
BP/NIM : 15133087/2015
Jurusan : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2019

Diketahui Oleh:
Koordinator Program Studi
Diploma III Akuntansi



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak
NIP. 19840809 201012 1 003

Disetujui Oleh:
Pembimbing



Nurzi Sabrina, SE., M. Sc., Ak
NIP. 1972091 199802 2 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA
ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

Nama : Veby Maya Revani
BP/NIM : 15133087/ 2015
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2019

Tim penguji:

Nama:

Tanda Tangan

Nurzi Sabrina, SE., M. Sc., Ak

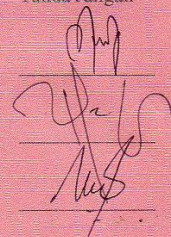
(Ketua)

Halkadri Fitra, SE, MM, Ak

(Anggota)

Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si.

(Anggota)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Veby Maya Revani
NIM/BP : 15133087/2015
Tempat/Tgl Lahir : Pasar Baru/ 12 mei 1997
Program studi : D3 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Kabupaten Pesisir Selatan, Pasar Baru (Bayang)
Judul Tugas Akhir : Analisis Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
Pada Pemerintah Daerah Pesisir Selatan

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir ini asli dan belum pernah di ajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan orang lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang di tulis atau diterbitkan orang lain kecuali acuan atau kutipan dengan mengutip tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi

Pernyataan ini saya buat dengan kesungguhan dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Perguruan Tinggi

Padang, Februari 2019



Veby Maya Revani
15133087

ABSTRAK

**Veby Maya Revani : Analisis Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Secara Elektronik Pada Pemda Kabupaten
Pesisir Selatan**

Pembimbing : Nurzi Sabrina, SE.,M.Sc., Ak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Pemda Kabupaten Pesisir Selatan serta untuk mengetahui bagaimana proses-proses pengadaan barang dan jasa dan bagaimana proses pembuatan kontrak untuk melakukan pengadaan barang dan jasa pada pemda Pesisir Selatan.

Bentuk penelitian yang dilakukan di dalam penulisan Tugas Akhir ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada Pemda Kabupaten Pesisir Selatan. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan mencatat secara sistematis hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, wawancara berupa tanya jawab yang dilakukan dengan karyawan yang terkait, sedangkan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berbentuk deskriptif, jenis sumber daya yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data tersebut dengan teori yang ada sehingga diperoleh hasil.

Hasil penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah berjalan dengan baik, dengan praktek yang baik yang sudah diterapkan untuk mendukung pengadaan barang dan jasa. Untuk melancarkan dan mengoptimalkan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Pemda Pesisir Selatan menggunakan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) yang disediakan oleh LPSE yang tentunya banyak memberikan kemudahan dan keuntungan dengan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Sebaiknya, Pemda Pesisir Selatan harus lebih baik lagi dalam melakukan pelayanan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Analisis Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Pada Pemda Kabupaten Pesisir Selatan”. Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di program studi Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah menyediakan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibuk Nurzi Sabrina, SE.,M.Sc., Ak selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

4. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Revindo, Ibunda Yaswarni, dan kedua Adik kandung Abhelio Revaldo dan sibungsu Rafael Teguh Alvaro dengan segala pengorbanannya yang telah memberikan kesungguhan do'a, selalu memberikan semangat kepada penulis dan mereka juga motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Teman-teman Novi Susanti, Chika Amanda, Dwianda Rezki Dharma yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Teman seperjuangan Tugas Akhir Lulukha Humaira, Mega Silvia yang membantu dan memberi suport satu sama lain nya serta membantu penulis dalam mencari data dalam keadaan hujan dan panas guna menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Terimakasih untuk sahabat dibalik layar teman-teman Cheribelle Dika, Dini, Suci, Mezza, Yuris, Nani, Merlin, Nova, Wella, Nada dan teman-teman rusuh Risiko dan Pinto yang telah memberikan semangat dan dukungan yang extra dan tiada hentinya kepada penulis.
7. Rekan-rekan mahasiswa program studi Diploma III Akuntansi tahun 2015

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan kepada semua pihak yang telah ikut memberikan dorongan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dengan keterbatasan pengetahuan, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini

masih jauh dari kesempurnaan dalam analisis dan pembahasan. Untuk itu penulis berharap adanya masukan ataupun saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri pribadi, almamater, lembaga dan orang banyak pada umumnya.

Padang, Januari 2019

Veby Maya Revani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Sistem	7
1. Pengertian Barang dan jasa Pemerintah.....	7
2. Pengertian Barang dan Jasa Secara Elektronik.....	12
3. Manfaat Pengadaan Secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>).....	13
4. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>)	14
B. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	18
C. Layanan Pengadaan Secara Elektronik	18
D. Asas Dan Etika Pengadaan	21
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Rancangan Penelitian.....	26
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Profil Kabupaten Pesisir Selatan.....	29
B. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pesisir Selatan	30
1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).....	30
2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik.....	31
3. LKPP.....	32
4. Tugas Pokok dan Fungsi LPSE Kabupaten Pesisir Selatan.....	32

5. Struktur Organisasi	33
C. Pembahasan.....	34
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 alur e-purchasing pengadaan barang dan jasa.....	16
Gambar 2 alur proses pendaftaran penyedia barang dan jasa.....	17
Gambar 3 gambar utama LPSE	19
Gambar 4 alur proses pendaftaran pengadaan barang dan jasa pemerintah	48
Gambar 5 surat perintah kerja	59
Gambar 6 surat perintah mulai kerja (SPMK).....	62
Gambar 7 surat penunjukan penyedia barang dan jasa(SPPBJ).....	63
Gambar 8 daftar kuantitas harga	64
Gambar 9 daftar kuantitas harga.....	66
Gambar 10 pengumuman penyedia jasa kontruksi.....	70
Gambar 11 pengumuman penyedia jasa kontruksi.....	71
Gambar 12 berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi	74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah merupakan satu rangkaian yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita untuk kesejahteraan rakyat tidak terkecuali bagi pemerintah daerah kabupaten Pesisir Selatan. Pengadaan barang dan jasa termasuk kedalam pengelolaan keuangan milik negara, proses pengadaan barang dan jasa harus didasarkan pada kebutuhan dan ketentuan Presiden Republik Indonesia yang terbaru yaitu Nomor 16 Tahun 2018, namun pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan masih menggunakan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, sarana dan prasarana pemerintah pun bervariasi mengikuti perkembangan dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Pengadaan barang dan jasa tersebut di biayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah. Belanja negara dan daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan daerah saerta pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja daerah sendiri adalah belanja yang di bagi-bagi ke pemerintah daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja pemerintah daerah itu sendiri meliputi dana bagi hasil, dana alokasi, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus.

Dalam pengadaan barang dan jasa supaya kebutuhan akan barang dan jasa terpenuhi dengan baik sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang terbatas, maka pemerintah perlu mengatur norma, prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa. Aturan tersebut terdapat pada Peraturan Presiden terbaru No. 16 Tahun 2018 dan peraturan perpres yang lama No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Maksud dari Peraturan Presiden yang terbaru No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan yang lama No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD. Sedangkan tujuan dari diberlakukannya Peraturan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Keuangan negara menjadi hal yang sangat penting untuk dapat mensukseskan pembangunan. Biaya ini dapat menunjang kelancaran pengurusan, pengelolaan dan penyelenggaraan Negara. Tidak ada suatu bentuk pengurusan, pengelolaan, atau penyelenggaraan negara yang tidak memerlukan biaya. Oleh karena itu untuk melakukan tugas-tugas tersebut harus mencari sumber pembiayaan, melakukan pengurusan, dan pengelolaan atas pendapatan tersebut, dan selanjutnya mendistribusikan untuk keperluan-keperluan rakyat.

Untuk melancarkan dan mengoptimalkan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Kabupaten Pesisir Selatan Pemda (Pemerintah Daerah) menggunakan

pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) yang di sediakan oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang tentunya akan memberikan banyak kemudahan dan keuntungan. *E-procurement* ini sendiri adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis internet dengan manfaat fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik ini merupakan sistem *e-procurement* (Pengadaan Secara Elektronik) yang di kembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah) lembaga ini menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.

Pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Pemerintah Daerah Pesisir Selatan dilakukan oleh bidang perekonomian pembangunan pada sub bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang atau layanan yang didirikan oleh Kementrian/Instansi/Perguruan Tinggi/BUMN/ serta Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP atau Petinggi Pengadaan dalam melakukan pengadaan atau layanan pemerintah secara elektronik.

Implementasi LPSE di Sumatera Barat sudah dibuat di sebagian kabupaten Penggunaan LPSE ini sudah dilakukan sejak tahun 2011 oleh Pemda Kabupaten Pesisir Selatan, dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi, LPSE sangat dibutuhkan untuk melakukan fungsi-fungsinya dalam menyediakan pengadaan barang/jasa tersebut. Layanan ini merupakan salah satu jalan yang dapat mempercepat sehingga tidak diperlukan pencetakan/printing dokumen

dalam jumlah banyak. Dengan adanya *e-procurement* telah mengurangi waktu dan biaya percetakan dokumen.

Seiring dengan semangat reformasi dan komitmen untuk mewujudkan *good governance*, pembenahan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah terus menerus diupayakan. Salah satu wujud pembenahan tersebut adalah upaya penguatan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa. Namun regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut memiliki dinamika perubahan yang cepat. Dinamika perubahan regulasi tersebut pada prinsipnya bertujuan agar proses pengadaan barang atau jasa pemerintah terselenggara dengan baik, terhindar praktek kecurangan. Sehingga tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terealisasi. Namun ternyata sampai saat ini kecurangan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa masih sangat tinggi bahkan potensi kecurangan dapat terjadi sejak tahapan perencanaan kebutuhan, pra kontrak, pelaksanaan kontrak, sampai tahap pasca kontrak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul Tugas Akhir yaitu “**Analisis Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penulisan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik?
2. Bagaimanakah proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengantisipasi Peraturan Presiden yang baru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada, maka tujuan penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik
2. Untuk mengetahui proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Pemerintah daerah Pesisir Selatan
3. Untuk mengetahui apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengantisipasi Peraturan Presiden yang baru

D. Manfaat penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk mengetahui bagaimana Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

pada Pemerintah Daerah Pesisir selatan serta apa saja kebijakan yang telah dilakukan oleh pemda pesisir selatan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, sekaligus memperdalam pengetahuan dan wawasan peneliti tentang permasalahan yang di bahas.

2. Bagi Perusahaan

Manfaat penelitian bagi perusahaan yaitu dapat di jadikan bahan panduan untuk melakukan Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang tentunya lebih baik lagi mengenai Pengadaan barang dan jasa yang dilakukannya.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Secara Elektronik dan sehingga hasil penelitian tersebut dapat di pergunakan sebagai referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan judul tugas akhir ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Mengenai Analisis Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Pada Pemda Pesisir Selatan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dimimpulkan bahwa:

1. Dalam memahami peraturan dan kebijakan pelayanan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik pada Pemda Pessel. Jika ditinjau dari kemudahan memahami persyaratan dapat dikatakan transparan karena setiap persyaratan yang diajukan oleh panitia memiliki kegunaan dalam proses pelayanan dan persyaratan juga mengacu pada setiap peraturan yang ada. Dalam melakukan setiap kebijakan pemda pessel masih memakai peraturan Nomor 54 Tahun 2010.
2. Setiap proses yang digunakan dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (SPSE) yang disebut juga *e-procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan Sistem Informasi yang memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi e-Lelang Umum (*e-Regular Tendering*) dan *e-purchasing* berbasis *website*. Dalam tahap persyaratan teknis dapat berupa spesifikasi barang (untuk pengadaan barang), gambar yang harus dibangun dan spesifikasinya (untuk pekerjaan kontruksi), output yang harus duhasilkan (jasa konsultasi) atau

pekerjaan yang harus dilaksanakan (jasa lainnya). Dukungan teknologi informasi ini dapat meningkatkan kapabilitas Pemda Pessel dalam memberikan kontribusi bagi penciptaan nilai tambah, serta mencapai efektifitas dan efisiensi.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemda Pessel untuk memiliki Kebijakan sendiri dari Pemda agar tidak terlalu mengacu pada peraturan presiden, walaupun begitu Perpres yang berlaku juga tidak boleh di abaikan semena-mena.
2. Disarankan kepada Pemda pessel untuk lebih mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dimilikinya agar pengguna akan aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) dapat lebih mencapai efektifitas dan efisiensi sehingga citra Pemda Pessel lebih dikena; oleh Instansi/Perusahaan lain serta dikalangan masyarakat umum.
3. Disarankan juga pada Pemda Pessel untuk segera melakukan pelatihan setiap adanya peraturan terbaru dari pemerintah pusat tentang pengadaan barang dan jasa sehingga Pemda Pessel tidak ketinggalan dalam setiap peraturan terbaru .

DAFTAR PUSTAKA

Arasana, I Putu jati. *Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah* oleh putu jati arsana. Ed, cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, November 2016

Ramli, samsul. *Bacaan wajib mengatasi aneka masalah teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah*. samsul ramli. penyunting, zulfa simatur. cet. 1. Jakarta: visimedia 2014.

Mudjisantosa, 2013, *Metode Pelelangan Sederhana dan Evaluasi Penawarannya Koperasi LKPP*, Jakarta

Mudjisantosa 2013, *Mudah Memahami Pengadaan 2013*. Primaprint-Jakarta.

Purwosusilo 2017. *Aspek hukum pengadaan barang dan jasa*. edisi pertama. Jakarta: kencana

Rupublik Indonesia, perpres RI No. 54 tahun 2010. *pengadaan barang/jasa pemerintah*

Republic Indonesia, perpres RI No 70 tahun 2012. *Perubahan kedua atas persturan presiden no 54 tahun 2010. pengadaan barang/jasa pemerintah*

Republic Indonesia, perpres ri no 82 Thun 2012 *penyelenggaraan dan sistem transaksi eletronik*